

Analisis Target Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya

Darul Anita

Akuntansi, Ekonomi, Universitas Teuku Umar

Email: darulanita@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan anggaran bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran belanja publik dengan keluaran dan hasil yang jelas sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah: Realisasi anggaran pendapatan dan belanja DPMPTSP tahun 2021. Pembahasan hasil dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP dapat mencatat pengeluaran secara efektif dan efisien. Selain itu, ia juga mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dengan memberikan solusi yang tepat, terbukti dengan peningkatan nilai pada aspek konsistensi."

Kata Kunci: *realisasi anggaran pendapatan dan belanja.*

Abstract

Budget management aims to create efficiency, effectiveness and accountability in the implementation of public expenditure budgets with clear outputs and results in accordance with national priorities. The purpose of this study is to describe the Regional Revenue and Expenditure Budget Analysis. The data used as a reference in this study are: Realization of the 2021 DPMPTSP revenue and expenditure budget. Discussion of the results was analyzed descriptively with a qualitative approach. The results show that DPMPTSP can record expenses effectively and efficiently. In addition, he is also able to overcome the challenges faced by providing the right solutions, as evidenced by the increased value in the aspect of consistency."

Keywords: *realization of revenue and expenditure budget.*

PENDAHULUAN

Indonesia mulai menerapkan penganggaran berbasis kinerja sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal itu tertuang dalam penjelasan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Munandar 2012, n.d.)

Sebuah undang-undang daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, merupakan rancangan keuangan yang dilakukan setiap tahun untuk pemerintah daerah yang dipertimbangkan dan disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Permendagri No. 22 Tahun 2011). Pendekatan berbasis kinerja dalam penyusunan APBD. Teknik penganggaran yang dikenal sebagai penganggaran berbasis kinerja menghubungkan pengeluaran manajemen dengan pendapatan dari tugas-tugas yang telah mengantisipasi keluaran dan hasil, termasuk efektivitas dalam mencapai tujuan ini. Penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip panduan anggaran berbasis kinerja saat membuatnya. Akuntabilitas dan transparansi anggaran adalah dua prinsip penganggaran berbasis kinerja. (Lauma et al., 2012)

Mewujudkan anggaran, melibatkan analisis dan evaluasi seberapa baik anggaran tersebut dijalankan (Munandar 2012, n.d.). Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan RAPBD telah direalisasikan (LRA). Analisis laporan keuangan adalah alat yang berguna untuk memahami angka-angka yang dikandungnya. Karena

anggaran pemerintah merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan, maka Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban daerah yang sangat penting. Namun realisasi anggaran selama pelaksanaannya masih jauh dari target yang ingin dicapai. Anggaran ini memainkan peran penting dalam memastikan keamanan finansial jangka panjang, mendistribusikan kekayaan, mengalokasikan dana publik, mengelola dan mengevaluasi operasi bisnis, dan mengevaluasi produktivitas karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memenuhi target pendapatan dan belanja daerahnya.

DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya harus mampu mengendalikan pengelolaan keuangan dan memanfaatkan hasilnya dengan memberi hasil yang maksimal agar pembangunan daerah bisa meningkat dalam kapasitasnya sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dipilihnya DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai subjek karena menjadi sebuah unsur penunjang tugas gubernur yang ditugasi melaksanakan segala urusan dan operasional terkait penanaman modal dan perizinan, dan berpijak pada misi DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan pelayanan publik yang tepat waktu, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Peneliti tertarik ingin melihat bagaimana Target Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 di DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya. Sesuai dengan definisi sebelumnya, Adapun tujuan di lakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Target Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja Tahun 2021 pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baik teori maupun praktek mengenai penerapan anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya. Mereka dapat berbagi ide dengan Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk DPMPTSP yang sedang dipelajari. Ini dapat memberi pembaca lebih banyak konteks, pemikiran, dan referensi yang berguna untuk penyelidikan di masa mendatang.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran dimaksudkan untuk memberikan ringkasan sumber daya keuangan yang dikuasai oleh pemerintah pusat atau daerah, termasuk sumber, alokasi, dan penggunaannya. Ini juga membandingkan anggaran dengan berapa banyak yang sebenarnya dihabiskan untuk itu selama periode pelaporan. (RASDIANTO, 2013)

Konsep Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikenal dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ada peraturan daerah yang mengatur APBD. Tahun anggaran APBD berlangsung selama satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember inklusif. APBD yang disahkan oleh DPRD dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Peraturan Daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah yang memuat seluruh penerimaan atau penerimaan pemerintah daerah dan pengeluaran atau pengeluaran, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang (Erlina dan Rasdianto (2013), 2019).”APBD disusun menurut berbagai sumber pendapatan dan belanja daerah. Baik uang pajak yang dikumpulkan secara lokal (PAD) dan pendapatan yang sah dari daerah dilacak secara terpisah. Berbagai jenis belanja langsung diperhitungkan dalam Anggaran Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Rudy Badrudin (2017:100), 2021) “pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.Sedangkan (Erlina dan Rasdianto (2013), 2019) menyatakan “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan/pendapatan daerah yang berasal dari perekonomian asli daerah, yang meliputi pendapatan asli daerah yang sah dan hasil distribusi daerah. Kesimpulan ini dapat diambil dari beberapa definisi yang diberikan di atas.

Pendapatan Daerah yang Sah

Semua pendapatan daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hibah, uang kartal, dan pendapatan lain-lain, selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Di sini, peneliti akan berbicara tentang hibah sebagai jenis pendapatan daerah yang wajar. Setiap pembayaran yang diterima dari pemerintah pusat yang tidak memerlukan pembayaran kembali, baik dalam bentuk uang tunai, barang dagangan, jasa, atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah, disebut sebagai pendapatan hibah.

Belanja Langsung

Yang dimaksud dengan "belanja langsung" adalah pengeluaran moneter yang secara khusus dialokasikan untuk tujuan pelaksanaan program dan prakarsa pemerintah daerah, dan dengan demikian direncanakan sedemikian rupa. Pengeluaran termasuk dalam kategori gaji karyawan, biaya operasi, dan investasi satu kali atau berulang.

Value for Money

Penilaian kinerja value for money, menurut (Erlina dan Rasdianto (2013), 2019) adalah metrik kinerja yang digunakan untuk menilai ekonomi, efektivitas, dan efisiensi suatu kegiatan, program, atau organisasi tertentu. Penilaian kinerja nilai uang menawarkan data yang dapat mempengaruhi fungsi kontrol dan memotivasi manajer untuk memenuhi tugas fungsi akuntabilitas mereka. Dengan demikian, menilai sumber daya secara efektif dapat membantu manajemen dalam membuat pilihan yang lebih tepat. Pihak eksternal, seperti mengelola dan memberi informasi untuk mengukur tingkat akuntabilitas publik, juga membutuhkan indikator kinerja yang dapat memberikan manfaat bagi mereka, seperti menunjukkan, memberi indikasi, atau memusatkan perhatian pada bidang yang relevan untuk diambil tindakan korektif. Value for money, di sektor publik, mengacu pada filosofi manajemen yang berpusat pada trifecta ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomi

Nilai input dibandingkan dengan input moneter mereka. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana input, seperti tenaga kerja dan bahan, berhubungan dengan output di pasar, atau, dengan kata lain, bagaimana mendapatkan output dengan kualitas dan kuantitas tertentu untuk jumlah uang yang paling sedikit. Yang dimaksud dengan "masukan" di sini adalah setiap dan semua bahan yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam bentuk kebijakan, program, atau kegiatan.

2. Efisiensi

Rasio output terhadap input mendefinisikan efisiensi. memaksimalkan hasil sambil meminimalkan sumber daya yang digunakan. Dalam konteks ini, output mengacu pada produk akhir dari suatu proses atau inisiatif. Ukuran efisiensi dalam hal evaluasi kinerja efektivitas biaya jatuh ke dalam dua kategori besar: efisiensi alokasi dan efisiensi teknis (manajerial).

3. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran kemampuan organisasi untuk berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Dimungkinkan untuk mendefinisikan efektivitas sebagai perbandingan antara produksi dan hasil. Efek dari tindakan tertentu adalah hasil dalam situasi ini. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai PAD yang dimaksudkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dimana pada penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder yang menjadi dasar pengolahan data pada penelitian ini. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara ditempat dan data sekunder didapatkan dari salah satu dinas yaitu penanaman modal dan pelayanan terpadu. Data penelitian ini bersumber dari internal organisasi (Dokumentasi dan Wawancara)."

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data didalam penelitian ini dilakukan melaui dokumentasi data keuangan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan wawancara secara langsung dengan sub bagian keuangan.

Teknik Analisis Data

Penjelasan hasil penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Pembahasan temuan didasarkan pada fakta dan informasi yang diperoleh baik dari tinjauan pustaka (diambil dari undang-undang, karya ilmiah, buku, dan artikel tentang topik yang dibahas) dan wawancara mendalam dengan informan kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penulis melakukan penelitian pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang bagaimana mengevaluasi pemenuhan anggarani pendapatan DPMPTSP dan belanja DPMPTSP negara berbasis kinerja. Penerimaan dan pengeluaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dibandingkan untuk menentukan tingkat efisiensi. LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah yang Sah seperti Pendapatan Hibah, Belanja Operasional seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa , dan Belanja Modal seperti Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan, Jaringan,

Tabel 4.1 Struktur LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya

Uraian	Catatan	TA 2021		% thd angg
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan	B.1			
Pendapatan Asli Daerah				
Pendapatan Restribusi Daerah		-	-	0,00
Pendapatan Daerah yg sah				
Pendapatan Hibah		14.645.400	14.645.400	100,00
Jumlah Pendapatan		14.645.400	14.645.400	100,00
Belanja	B.2			
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	B.3	2.974.563.331	2.547.664.996	85,65
Belanja Barang dan Jasa	B.4	1.203.878.497	1.047.733.746	87,03
Jumlah Belanja Operasi		4.178.441.828	3.595.398.742	86,05
Belanja Modal	B.5			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.6	29.692.190	29.692.190	100,00
Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	B.7	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		29.692.190	29.692.190	100,00
Jumlah Belanja		4.208.134.018	3.625.090.932	86,14

Sumber: (Daya, 2021)

Pembahasan

Pendapatan

Sebagai konsekuensi dari kegiatan operasional atau perolehan produk dan layanan untuk masyarakat umum, atau pelanggan pada khususnya, (Erlina dan Rasdianto (2013), 2019) mencatat bahwa pendapatan adalah pertumbuhan atau peningkatan aset dan penurunan atau penurunan kewajiban perusahaan. DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya tidak memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan Restribusi Daerah) hal itu disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Namun Pendapatan berasal dari Hibah Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa paket pekerjaan pengadaan belanja barang computer untuk daerah TA 2021. Pendapatan Hibah tahun 2021 sebelumnya ditargetkan dengan Anggaran sebesar 14.645.400 kemudian terealisasi sebesar 14.645.400 sehingga diperoleh persen (%) terhadap anggaran sebesar 100,00.

Belanja

Belanja pada DPMPTSP pada tahun 2021 terbagi menjadi dua yaitu Belanja Operasi dan Belanja modal. Berikut penjelasan dari target anggaran belanja;

Belanja Operasi

Belanja Operasional adalah anggaran operasional belanja daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan prakarsa dan program pemerintah daerah. Pengeluaran pegawai dan pengeluaran barang dan jasa adalah dua kategori utama dari jenis pengeluaran ini:

Belanja pegawai

Belanja Pegawai adalah uang yang dialokasikan untuk membayar upah dan tunjangan pekerja tetap, menambah gaji pegawai pemerintah, dan memberikan insentif bagi mereka untuk menuntut imbalan daerah. Dengan demikian, anggaran sebesar 2.974.563.331 untuk biaya pegawai yang ditargetkan terealisasi sebesar 2.547.664.996 atau mencapai 85,65 % dari total anggaran. Karena adanya mutasi staf, mutasi, dan tersedianya jabatan struktural yang terbuka, realisasi belanja pegawai kurang dari sasaran anggaran.

Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran uang untuk produk dan layanan termasuk membeli perlengkapan kantor, menyewa peralatan kantor, dan membayar layanan pemeliharaan peralatan. ditargetkan dengan anggaran sebelumnya 1.203.878.497. Kemudian terealisasi sebesar 1.047.733.746 sehingga diperoleh persen(%) terhadap anggaran sebesar 87,03. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang lebih kecil daripada target anggaran disebabkan berkurangnya alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Modal

Seperti yang dikatakan (Erlina dan Rasdianto (2013), 2019) Anggaran belanja modal tetap berwujud yang membayar dividen lebih dari satu periode akuntansi disebut sebagai belanja modal. Pembelian peralatan dan perlengkapan serta belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan merupakan belanja modal DPMPTSP tahun 2021.

Belanja Peralatan dan Mesin

Pengeluaran peralatan dan mesin adalah biaya yang terkait dengan pembelian alat dan mesin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu. Pengeluaran ini termasuk harga pembelian, biaya pengiriman dan pemasangan, serta biaya langsung lainnya yang terkait dengan perolehan dan penyiapan alat dan mesin sebelum digunakan. Sebelumnya ditargetkan dengan anggaran sebesar 29.692.190 kemudian terealisasi sebesar 29.692.190 sehingga diperoleh persen(%) terhadap anggaran sebesar 100,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya modal pembangunan serta biaya-biaya lain yang dibayarkan sebelum jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan siap digunakan, diperhitungkan sebagai bagian dari belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan. Untuk tahun anggaran 2021 realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan diproyeksikan sebesar Rp0,- tidak turun -100 persen. Sebab, dalam APBD TA 2021 tidak ada alokasi dana untuk belanja modal jalan, irigasi, atau jaringan.

Berdasarkan Penjelasan Belanja diatas, Realisasi Belanja pada DPMPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat daya pada TA 2021 adalah sebesar Rp 3.625.090.932, atau 86,14 persen dari Anggaran sebesar Rp 4.208.134.018. Penulis menemukan bahwa evaluasi kinerja value for money dari (DPMPTSP) telah efektif berdasarkan konsep value for money seperti yang dijelaskan dalam studi literatur. Laporan Realisasi Anggaran 2021 menunjukkan penggunaan input yang paling efisien untuk menghasilkan output tertentu, yang diukur dengan biaya operasional dan modal.

SIMPULAN

Seluruh penjelasan dan pembahasan pada Bab IV ini berdasarkan tinjauan penulis terhadap Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan tinjauan tersebut, penulis dapat menyimpulkan “bahwa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Anggaran yang dicapai pada Badan Pelayanan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara umum telah dilaksanakan secara efisien namun belum efektif. Pada tabel pendapatan yaitu sudah terealisasi daripada tahun sebelumnya dikarenakan adanya Realisasi Penerimaan Pendapatan Hibah TA 2021 sebesar Rp 14.645.400 dari target anggaran sebesar Rp 14.645.400 sehingga memperoleh anggaran sebesar 100,00%. Pada tabel Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar -67,4% Dibandingkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran sebelumnya, Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah alokasi anggaran TA 2021 dibandingkan alokasi anggaran tahun sebelumnya. pada belanja anggaran tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 3.625.090.932 dari target anggaran yang sebelumnya diharapkan sebesar Rp 4.208.134.018 sehingga memperoleh Anggaran sebesar 86,14%.”

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina dan Rasdianto (2013). (2019). Belanja Modal. 102.
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2012). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. 7(2), 57–77.
- Munandar 2012. (n.d.). Realisasi Anggaran Munandar (2012).
- RASDIANTO, E. (2013). LAPORAN REALISASI ANGGARAN. 23.
- Rudy Badrudin (2017:100). (2021). Pendapatan Asli Daerah.
- Badrudin, D. R. (2017). Anggaran pendapatan asli daerah. 98.
- Daya, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten aceh barat. (2021). LAPORAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
- RASDIANTO, E. (2013). LAPORAN REALISASI ANGGARAN. 23.